

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *United Nations Development Programme* (UNDP) mencantumkan poin pertama dari Tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral dibanyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidak adilan dalam memperoleh akses pendidikan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi penduduk kaya dan peduduk miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya (Alghofari, 2008).

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai,

maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi (Fitri, 2012).

Menurut Mirza (2012), kemiskinan timbul dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. Kemiskinan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi orang miskin untuk melaksanakan kegiatan, seperti tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin di pedalaman di keranakan ketertinggalan dari berbagai aspek seperti, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk medapat perobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya yang disebabkan dari dirinya sendiri, keturunan, dan ada juga dari luar seperti lingkungan hidup, dan pemerintah.

Fenomenannya kemiskinan merupakan masalah mendasar yang kerap muncul di Indonesia di mana kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat menikmati standar kesehatan, standar pendidikan dan standar kehidupan yang layak. Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Selain kemiskinan, pendidikan juga suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan, terutama dalam masyarakat yang berbudaya, sehingga setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak untuk

mengembangkan potensi yang dimilikinya guna menjalani hidup di era globalisasi yang penuh persaingan. Hal ini juga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 28C (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Namun kondisi pendidikan di Indonesia belum seperti yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh undang-undang. Pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Faktanya di Indonesia, hari ini masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah bahkan tidak memperoleh pendidikan sama sekali dengan berbagai faktor seperti: faktor ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya dan faktor lingkungan. Hasil Susenas 2022 menunjukan dari tahun 2018 hingga 2023 tingkat penduduk Indonesia usia 5 tahun keatas yang tidak bersekolah lagi cenderung meningkat, peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023. Kemudian jika dirinci dari penduduk usia sekolah (7-18 tahun) tingkat penduduk yang tidak bersekolah lagi paling tinggi berada pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun atau penduduk usia SMA/sederajat yaitu sebesar 26,5 persen. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat 1 dari 4 penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam membangun pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya tercapai. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2023:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007-2023

Tahun	Penduduk Miskin (jiwa)
2007	3716830
2008	3496330
2009	3252997
2010	3102339
2011	3001893
2012	2859464
2013	2855397
2014	2772778
2015	2851357
2016	2776432
2017	2658299
2018	2567458
2019	2478587
2020	2754969
2021	2650365
2022	2636327
2023	2589855

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia 14 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana kemiskinan di indonesia tertinggi terjadi pada tahun Tahun 2010 dengan persentase 31,02 % dan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 24,79 %. Hal ini terjadi karna naiknya rata-rata upah riil buruh per hari. Kemiskinan yang diukur dari jumlah penduduk miskin yang tinggi merupakan masalah utama yang dialami oleh negara berkembang salah satunya Indonesia. Salah satu ciri pertama suatu daerah mampu melakukan otonomi suatu daerah dinyatakan sebagai pada kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk tujuan tingkat angka proporsi ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli suatu daerah harus

menjadi alat utama dalam dana pembangunan ekonomi daerah. Tujuan dari otonomi suatu daerah dinyatakan sebagai untuk menekan angka kemiskinan dalam suatu daerah (Kadafi & Murtala). Kemiskinan di Indonesia disebabkan berbagai faktor, seperti kondisi investasi, tingkat pengangguran dan lambatnya perekonomian. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, salah satu upaya yang efektif yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi (Darsana & AA Gede, 2019). Kemiskinan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi di negara tinggi dapat menurunnya kemiskinan sebaliknya, jika ekonomi wilayah rendah maka kemiskinan akan naik, (Fatmawati & Khairil, 2018).

Perkembangan perekonomian merupakan gejala yang timbul dari beberapa jenis sektor yang secara tidak langsung menjelaskan tingkat pertumbuhan kemajuan suatu negara. Bukan juga negar-negara tetapi juga bagi suatu daerah, indikator pertumbuhan ekonomi ini begitu penting untuk melihat kesuksesan kegiatan perekonomian suatu daerah di masa mendatang. Hal ini diakui sebagai sebuah proses dari perubahan yang berlangsung secara sadar dan terencana serta berkelanjutan dengan sasaran pertamanya yaitu untuk menaikkan kesejahteraan kehidupan manusia ataupun masyarakat (Anwar & Fatmawati, 2018)

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah ada hentinya yang telah ada sejak lama. Banyaknya jumlah penduduk dan tidak meratanya pembangunan, kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang tersebar di kota maupun di desa, rendahnya kualitas

sumberdaya manusia karena rendahnya pendidikan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan (Nabila, 2015)

Pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan, geografi, dan lingkungan merupakan aspek-aspek yang saling berhubungan dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan di suatu wilayah. Misalnya, individu dengan tingkat pendidikan rendah mungkin tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Pendapatan individu ini akan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dapat mereka akses. Kesejahteraan seseorang dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar berhubungan langsung dengan pendapatannya, dan gaji yang lebih rendah sering dikaitkan dengan kualitas pekerjaan yang lebih buruk. Melibatkan masyarakat secara keseluruhan sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik merupakan contoh pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan standar hidup dengan menjadikan masyarakat lebih siap kerja (Fadila & Marwan, 2020).

**Tabel 1.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia Tahun 2007-2023**

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C (%)
2007	59,46
2008	59,06
2009	62,55
2010	62,85
2011	64,90
2012	68,80
2013	66,61
2014	74,26
2015	78,02
2016	80,89
2017	82,84
2018	80,68

2019	83,98
2020	84,53
2021	85,23
2022	85,82
2023	86,34

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/SMK/MA/ Paket C mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana terendah terjadi pada tahun 2010 dengan presentase 62,85 % dan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah presentase sebesar 85,82%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan (Hikma dkk, 2020). Hal tersebut, disebabkan adanya usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Hal ini terjadi Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah SM/SMK/MA/ Paket C yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, dimana semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Persentase APK untuk jenjang pendidikan SD pada penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SD sudah maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi.

Persentase APK SMA/SMK menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SMA termasuk dalam kategori tinggi. Persentase APK SMA yang terdiri dari penduduk usia sekolah yang bersekolah SMA dan SMK, Persentase tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SM termasuk dalam kategori tinggi. Persentase APK PT menunjukkan bahwa partisipasi

pendidikan penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi termasuk dalam kategori rendah karena, terdapat penduduk yang sudah bekerja pada usia tersebut dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya Todaro (2006).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah (Fitri, 2012).

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi pendidikan yang terdiri dari dua variabel yaitu angka partisipasi kasar dan angka partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Hal ini karena populasi murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dimana semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan (Deffrinaca, 2017).

Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni : (1) harapan bagi seorang siswa

yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang. (2) biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya. Sedangkan pada sisi penawaran, jumlah sekolah ditingkat sekolah dasar, menengah dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi. tingkat penawaran atau fasilitas sekolah dibatasi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan (Rutfiana dkk, 2020). persentase APK pada penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan sudah maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi.

Persentase APK menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan termasuk dalam kategori tinggi. Persentase APK yang terdiri dari penduduk usia sekolah yang bersekolah SMA dan SMK, Persentase tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SMA termasuk dalam kategori tinggi.

Pendidikan anak sekolah SMA/SLTA di Indonesia ternyata masih terbatas di perkotaan karena masih tergantung pada partisipasi orang tua dalam pengelolaan SMA/SLTA dan aksesibilitas. Distribusi guru pada berbagai jenjang juga tidak merata (Mahbub et al., 2020). mengatakan pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan di desa, dimana kota adalah banyaknya informasi yang ada, dan juga adanya internet yang mendunia saat ini. sedangkan di desa tidak seperti itu bahkan mungkin sebaliknya. Fenomena pendidikan masyarakat perkotaan salah satunya yaitu, masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah

mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa . Ketidakmampuan desa untuk berhadapan dengan pesatnya kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri. Seringkali pengembangan pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah desa banyak yang tidak disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan dalam penyusunan kurikulum terkadang disamakan dengan pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah kota (Anas dkk, 2015).

**Tabel 1.3
Upah Minimum di Indonesia Tahun 2007-2023**

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)
2007	672480
2008	745709
2009	841530
2010	908824
2011	988829
2012	1088903
2013	1296908
2014	1584391
2015	1790342
2016	1997819
2017	2168874
2018	2455662
2019	2455662
2020	2672371
2021	2712371
2022	2725626
2023	2923309

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas terlihat bahwa perkembangan Upah Minimum di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana upah minimum terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai Rp.1.790.342 Rupiah dan tertinggi

terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.923.309 terjadi peningkatan di setiap tahunan di karenakan nilai rata-rata semakin membaik. Peningkatan upah minimum provinsi disetiap tahunnya diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan menaikkan angka PDRB. Namun, peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah dibeberapa tahun justru membuat pengangguran meningkat dan menurunkan angka PDRB. Upah minimum yang berdampak luas dan berpengaruh lansung terhadap kesejahteraan pekerja mendapat perhatian besar dari pekerja dan penetapan upah minimum amat bergantung terhadap political will pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan (Lubis & Murtala, 2021).

Sumarsosno dalam Agustina (2021), menjelaskan bahwa tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, konsumen akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang yang bersangkutan.

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Seperti dalam pendekatan model kompetitif dijelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap tahun serta kenaikannya yang berada diatas tingkat keseimbangan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dimana kenaikan upah minimum ini akan mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan pengurangan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dan ini akan dapat

meningkatkan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Sedangkan berdasarkan pada model dual sektor kenaikan upah minimum ini juga memiliki dampak terhadap pekerja di sektor informal.

Upah minimum juga memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja, namun peningkatan pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada bertambahnya tingkat kemiskinan (Rini, 2013).

Pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas, sehingga mampu menyerap penambahan tenaga kerja. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka produksi barang atau jasa yang dihasilkan akan mengalami peningkatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara khususnya Indonesia dalam memberikan keadilan dan kemakmuran terhadap masyarakat (Airus Jonaidi, 2012).

Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidak adilan dalam memperoleh akses pendidikan antara sikaya dan simiskin. Dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi sikaya dan simiskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah

direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi (Amalia, 2012).

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) (Amalia, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut sehingga penulis memberi judul proposal judul skripsi ini **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2010-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjelasan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Angka Partisipasi Kasar terhadap Penduduk Miskin di Indonesia?

2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Angka Partisipasi Kasar dan Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Angka Partisipasi Kasar terhadap Penduduk Miskin di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Angka Partisipasi Kasar dan Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi yang berhubungan dengan Pendidikan, Upah Minimum dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia
- c. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan konseptual dan sebagai kajian untuk menambah wawasan pengetahuan serta bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya diIndonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai Pendidikan, Upah Minimum dan Penduduk Miskin Di Indonesia
- b. Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan referensi dan informasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang berada di Indonesia